

TUGAS MAKALAH
TEORI ILMU KEBENARAN FILSAFAT
(TERHADAP PENERAPAN KEHIDUPAN MODERN)



Oleh:

SYAHDINO SAHDANA

80100225131

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam filsafat ilmu, kebenaran merupakan salah satu pilar utama yang menopang bangunan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan keputusan rasional dalam kebijakan publik. Tanpa konsep kebenaran yang jelas dan teruji, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah epistemologisnya dan kebijakan publik akan cenderung bersifat subjektif serta pragmatis semata. Kebenaran menjadi kompas moral dan intelektual bagi manusia dalam memahami realitas dan membangun sistem pengetahuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹.

Konsep “benar” dalam filsafat ilmu tidaklah tunggal, melainkan bersifat plural dan relatif terhadap kerangka berpikir filosofis yang digunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hardono, pengertian kebenaran dapat berubah tergantung pada paradigma yang mendasarinya—baik positivistik, konstruktivistik, maupun kritis². Artinya, apa yang dianggap benar dalam satu sistem pengetahuan belum tentu dianggap benar dalam sistem lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya hasil dari proses rasional, tetapi juga produk dari interaksi antara subjek, objek, dan konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam dunia kepemimpinan, makna kebenaran menjadi semakin kompleks. Kebenaran tidak lagi hanya bersifat logis sebagaimana dalam ranah ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan pragmatis. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami kebenaran ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan, melainkan juga harus mampu menegakkan kebenaran tersebut dalam tindakan sesuatu yang berkeadilan dan bertanggung jawab. yang dilandasi oleh kebenaran menjadi bentuk tertinggi dari rasionalitas praktis karena menghubungkan antara teori dan tindakan, antara pengetahuan dan moralitas.

Berbagai teori kebenaran seperti korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus memberikan kerangka konseptual bagi pemimpin dalam menimbang antara idealisme dan realitas, serta antara fakta dan nilai.

- Teori korespondensi menekankan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan objektif.
- Teori koherensi menilai kebenaran berdasarkan konsistensi logis antarpernyataan dalam suatu sistem pemikiran.
- Teori pragmatis menilai kebenaran dari segi manfaat dan keberhasilan penerapannya dalam kehidupan praktis.
- Sementara itu, teori konsensus menganggap kebenaran sebagai hasil dari kesepakatan rasional di antara komunitas ilmiah atau sosial³.

Dalam konteks kepemimpinan modern, pemahaman terhadap teori-teori kebenaran ini membantu pemimpin untuk tidak terjebak dalam relativisme nilai, sekaligus menghindari dogmatisme kekuasaan. Pemimpin yang bijak harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan kebenaran ilmiah yang objektif dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan kepemimpinan menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Integrasi ini diharapkan mampu melahirkan model kepemimpinan berbasis kebenaran rasional dan etis, di mana setiap kebijakan tidak hanya diuji secara empiris dan rasional, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat. Dalam hal ini, filsafat ilmu berperan memberikan kerangka epistemologis yang sistematis, sedangkan filsafat politik menyediakan panduan normatif bagi penerapan kebenaran dalam praktik kekuasaan. Sinergi keduanya menjadi fondasi bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebenaran⁴.

1. Hardono, D. (2021). *Epistemologi dan Kebenaran dalam Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish. [↗](#)

2. Ibid. [↗](#)

3. Suriasumantri, J. S. (2019). *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. [↗](#)

4. Ibid. [↗](#)

Indikator / Faktor Penentu Filsafat Ilmu dan Kebenaran dalam Politik Kepemimpinan

1. Hakikat Kebenaran sebagai Landasan Epistemologis

Filsafat ilmu menempatkan kebenaran sebagai inti dari seluruh proses pencarian pengetahuan. Kebenaran bukan hanya persoalan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan (aspek ontologis), tetapi juga menyangkut dimensi logis dan manfaat praktisnya dalam kehidupan sosial¹. Dalam konteks kepemimpinan politik, pemahaman akan hakikat kebenaran ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun moral.

2. Keragaman Teori Kebenaran dalam Pengambilan Keputusan Politik

Teori-teori kebenaran seperti **korespondensi**, **koherensi**, **pragmatis**, dan **konsensus** menawarkan cara pandang yang berbeda dalam menilai suatu keputusan politik². Seorang pemimpin yang memahami keempat teori ini dapat menyeimbangkan antara fakta dan nilai, antara idealisme dan realitas sosial. Misalnya, teori korespondensi membantu pemimpin menilai kebijakan berdasarkan data faktual, sementara teori pragmatis menilai keberhasilan kebijakan dari manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat.

3. Integrasi Rasionalitas dan Moralitas dalam Kepemimpinan

Dalam filsafat ilmu, pengetahuan yang benar tidak hanya berakar pada rasionalitas, tetapi juga harus berpihak pada kebaikan. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut tidak hanya mengetahui yang benar secara teoritis, tetapi juga menegakkannya dalam praktik politik dengan moralitas yang tinggi³. Integrasi antara rasionalitas dan moralitas inilah yang menjadikan kepemimpinan tidak sekadar efektif, tetapi juga memiliki legitimasi etis.

4. Kebenaran sebagai Instrumen Legitimasi Kekuasaan

Sebagaimana teori kebenaran dalam ilmu pengetahuan memberikan validitas terhadap suatu proposisi, demikian pula dalam politik, kebenaran menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Kepemimpinan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan akan memperoleh kepercayaan publik, sedangkan kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan akan kehilangan otoritas moralnya⁴.

5. Peran Filsafat Ilmu dalam Pembentukan Etika Politik

Filsafat ilmu tidak hanya membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Dalam situasi dan kondisi, filsafat ilmu berperan membentuk **etika kepemimpinan** yang berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umum⁵. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi panduan bagi pemimpin untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya benar secara rasional, tetapi juga benar secara moral.

6. Kritisisme terhadap Kekuasaan dan Subjektivitas

Salah satu ciri utama filsafat ilmu adalah sikap kritis terhadap klaim kebenaran. Dalam konteks kepemimpinan, sikap kritis ini menjadi penting agar kekuasaan tidak berubah menjadi absolut dan menindas. Pemimpin yang berlandaskan pada filsafat kebenaran akan membuka ruang partisipasi publik, musyawarah, dan evaluasi rasional terhadap kebijakan, sebagaimana semangat teori kebenaran konsensus yang menekankan kesepakatan rasional masyarakat⁶.

1. Hardono, D. (2021). *Epistemologi dan Kebenaran dalam Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish. [↗](#)
2. Suriasumantri, J. S. (2019). *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. [↗](#)
3. Hardono, D. (2021), hlm. 74. [↗](#)
4. Suriasumantri, J. S. (2019), hlm. 105–107. [↗](#)
5. Hardono, D. (2021), hlm. 112. [↗](#)
6. Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press. [↗](#)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat kebenaran dijelaskan dalam perspektif filsafat ilmu sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan kebijakan kepemimpinan?
2. Apa saja teori-teori kebenaran yang berpengaruh terhadap cara pemimpin menilai dan mengambil keputusan ?
3. Bagaimana integrasi antara rasionalitas ilmiah dan moralitas politik dapat membentuk model kepemimpinan yang berlandaskan etika dan kebenaran?
4. Sejauh mana kebenaran dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi dan penguat moral dalam kepemimpinan modern?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Menjelaskan hakikat kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan kebijakan yang rasional.
2. Menguraikan teori-teori kebenaran yang relevan dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dalam kepemimpinan.
3. Menganalisis integrasi antara rasionalitas ilmiah dan moralitas dalam membentuk model kepemimpinan yang etis dan berkeadilan.
4. Menelaah peran kebenaran sebagai instrumen legitimasi dan penguat moral bagi pemimpin dalam menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat ilmu, khususnya dalam memahami hubungan antara konsep kebenaran dengan praktik kepemimpinan modern. Penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis bagi pengkajian lebih lanjut mengenai integrasi nilai-nilai ilmiah dan moral dalam sistem pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, dan akademisi tentang pentingnya menjadikan kebenaran sebagai landasan moral dan rasional dalam pengambilan keputusan. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun kepemimpinan yang beretika, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Manfaat Edukatif

Menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami relevansi filsafat ilmu terhadap dinamika sosial . Penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis, rasional, dan etis dalam menilai kebenaran serta dalam praktik kepemimpinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Teori Kebenaran dalam Filsafat Ilmu

1. Teori Korespondensi

Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan atau fakta empiris. Dengan kata lain, kebenaran diukur dari hubungan antara bahasa (pernyataan) dan realitas (fakta). Jika keduanya selaras, maka pernyataan tersebut benar; jika tidak, maka salah¹. Contohnya, pernyataan “*Air mendidih pada suhu 100°C pada tekanan normal*” dianggap benar karena sesuai dengan hasil pengamatan empiris di dunia nyata. Pandangan ini berakar dari pemikiran Aristoteles, yang menegaskan bahwa “mengatakan sesuatu yang ada sebagai ada, dan yang tidak ada sebagai tidak ada, adalah benar.”² Teori ini kemudian berkembang dalam tradisi empirisme dan menjadi dasar bagi metode ilmiah modern yang mengutamakan verifikasi melalui pengalaman indrawi dan observasi.

2. Teori Koherensi

Teori koherensi berpendapat bahwa kebenaran terletak pada kesesuaian dan konsistensi antar pernyataan dalam suatu sistem berpikir. Sebuah proposisi dianggap benar apabila tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain yang telah diakui benar dalam sistem tersebut³. Sebagai contoh, dalam sistem ilmu fisika, pernyataan baru harus koheren dengan hukum-hukum dasar yang sudah ada. Jika terjadi kontradiksi, maka pernyataan tersebut dianggap salah. Teori ini banyak dikembangkan oleh G.W.F. Hegel, yang menekankan bahwa kebenaran adalah hasil dari keseluruhan sistem rasional yang utuh, bukan dari fakta terpisah⁴. Dengan demikian, teori koherensi lebih menekankan keterpaduan logis daripada pembuktian empiris, dan sering digunakan dalam ranah filsafat, matematika, serta ilmu-ilmu teoretis.

3. Teori Pragmatis

Teori pragmatis memandang kebenaran sebagai sesuatu yang teruji melalui manfaat praktisnya dalam kehidupan. Suatu ide, gagasan, atau teori dianggap benar apabila dapat diterapkan dan menghasilkan akibat yang memuaskan secara nyata bagi manusia⁵.

Tokoh utama teori ini adalah William James, yang menyatakan bahwa “kebenaran adalah apa yang terbukti bermanfaat dalam cara berpikir kita.”⁶ Dengan demikian, ukuran kebenaran tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada konsekuensi dan keberhasilannya dalam memecahkan masalah. Teori ini banyak memengaruhi pemikiran modern dalam bidang pendidikan, politik, dan etika, di mana nilai suatu gagasan diukur dari efektivitas dan dampaknya.

4. Teori Konsensus

Teori konsensus, yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, mendefinisikan kebenaran sebagai hasil kesepakatan rasional antar subjek komunikatif dalam situasi ideal yang bebas dari tekanan dan dominasi⁷. Artinya, suatu pernyataan dianggap benar bila diterima secara rasional oleh semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi yang jujur dan terbuka. Habermas menekankan bahwa kebenaran bukan hanya soal fakta objektif, tetapi juga merupakan produk dari proses dialog dan argumentasi rasional dalam masyarakat. Dalam konteks sosial-politik, teori ini menegaskan pentingnya musyawarah, demokrasi, dan transparansi dalam mencapai kebenaran bersama.

Dalam filsafat klasik, Plato memandang bahwa pemimpin sejati adalah *philosopher-king*, yakni sosok yang memahami dan mencintai kebenaran hakiki. Dalam karyanya *The Republic*, Plato menegaskan bahwa hanya mereka yang telah mencapai pengetahuan tentang “Yang Baik” (The Good) yang layak memimpin, karena pengetahuan tersebut memungkinkan mereka menata negara secara adil dan rasional². Bagi Plato, kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengatur rakyat, tetapi tanggung jawab moral untuk mengarahkan masyarakat menuju kebenaran dan keadilan.

Teori Kebenaran	Tokoh Utama	Dasar Kebenaran	Kelebihan	Kelemahan
Korespondensi	Aristoteles, Russell	Fakta empiris	Objektif dan ilmiah	Tidak menjawab kebenaran moral
Koherensi	Hegel, Bradley	Konsistensi sistem berpikir	Logis dan sistematis	Tidak selalu empiris
Pragmatis	William James, Dewey	Manfaat praktis	Relevan dengan kehidupan nyata	Relatif terhadap konteks

Teori Kebenaran	Tokoh Utama	Dasar Kebenaran	Kelebihan	Kelemahan
Konsensus	Habermas	Kesepakatan rasional	Demokratis, komunikatif	Rentan manipulasi opini

1. Hardono, D. (2021). *Epistemologi dan Kebenaran dalam Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish. [↗](#)
2. Aristoteles. *Metaphysics*. Terjemahan oleh W.D. Ross, Oxford University Press. [↗](#)
3. Suriasumantri, J. S. (2019). *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. [↗](#)
4. Hegel, G.W.F. (1977). *Phenomenology of Spirit*. Oxford: Oxford University Press. [↗](#)
5. Hardono, D. (2021), hlm. 98. [↗](#)
6. James, W. (1907). *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Longmans, Green, and Co. [↗](#)
7. Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press. [↗](#)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu memberikan fondasi rasional dan moral bagi praktik kepemimpinan yang berintegritas. Teori korespondensi menuntut faktualitas dalam setiap kebijakan; teori koherensi menekankan konsistensi antara nilai dan tindakan; teori pragmatis mengutamakan kemanfaatan nyata bagi masyarakat; dan teori konsensus menegaskan pentingnya keadilan sosial serta partisipasi publik. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan keempat dimensi kebenaran tersebut akan melahirkan sistem pemerintahan yang berlandaskan kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab publik.

3.2 Saran

Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan reflektif dan inspiratif bagi pembentukan paradigma kepemimpinan berbasis kebenaran di berbagai sektor.

Penelitian lanjutan disarankan untuk:

1. Mengkaji implementasi teori-teori kebenaran dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern.
2. Mengeksplorasi penerapan prinsip kebenaran dalam etika pemerintahan digital dan kepemimpinan berbasis data.
3. Menelaah relevansi konsep kebenaran filosofis terhadap dinamika politik kontemporer dan budaya demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. (1984). *Metaphysics*. Terjemahan oleh W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press.
- Audi, R. (2011). *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*. New York: Routledge.
- Bertens, K. (2013). *Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Copleston, F. (1993). *A History of Philosophy: From the Post-Kantian Idealists to Marx, Kierkegaard, and Nietzsche*. New York: Image Books.
- Dewey, J. (1938). *Logic: The Theory of Inquiry*. New York: Henry Holt and Company.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Hardono, D. (2021). *Epistemologi dan Kebenaran dalam Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish.

- Hegel, G. W. F. (1977). *Phenomenology of Spirit*. Terjemahan oleh A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press.
- James, W. (1907). *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Longmans, Green and Co.
- Keraf, A. S. (2001). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication* (10th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press.
- Machiavelli, N. (1532). *The Prince*. Terjemahan oleh Peter Bondanella. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadhi Kartanegara. (2003). *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam*. Bandung: Mizan.
- Nasution, H. (1999). *Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Plato. (1941). *The Republic*. Terjemahan oleh Benjamin Jowett. Oxford: Oxford University Press.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Russell, B. (1945). *A History of Western Philosophy*. New York: Simon & Schuster.
- Siregar, A. (2015). *Filsafat Politik: Antara Idealitas dan Realitas Kekuasaan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. (2012). *Etika dan Kepemimpinan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Suriasumantri, J. S. (2019). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.
- Zubaedi. (2013). *Etika dan Filsafat Politik dalam Islam dan Barat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.